



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
UNIT KERJA : DEWAN PENGAWAS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **INDRIYANTO SENO ADJI**
2. Jabatan : **ANGGOTA DEWAN PENGAWAS**
3. NHK : **186666**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **20.693.183.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 336 m2/317 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 6.333.280.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 323.378.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/100 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 566.525.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 869 m2/900 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 13.470.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. **2.480.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA VELLFIRE Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 980.000.000
2. MOBIL, TOYOTA LANDCRUISER Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. **110.000.000**

D. SURAT BERHARGA

Rp. **1.700.000.000**

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. **2.000.250.481**

F. HARTA LAINNYA

Rp. **----**

Sub Total

Rp. **26.983.433.481**

III. HUTANG

Rp. **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. **26.983.433.481**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.